



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:

Haris Hargo Hutomo

NIM: 120810301087

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Suwarni, nenek Marti, dan ayahanda Yuli Haryono yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Venna Melinda, seseorang yang luar biasa, terbaik, yang ku kenal;
3. Sahabatku Drajat Priyo Triadmojo dan Aditya Alifianto.
4. Guru – guruku sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas.
5. Dosen – dosenku di Perguruan Tinggi.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya akan didapatkan oleh mereka yang semangat mengejarnya.

(Abraham Lincoln)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Hargo Hutomo

NIM : 12810301087

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2017

Yang menyatakan,

Haris Hargo Hutomo

NIM 120810301087

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Oleh:

Haris Hargo Hutomo

NIM: 120810301087

Pembimbing:

Dosen pembimbing 1: Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak

Dosen Pembimbing 2: Andriana SE, M.SA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PPENERIMAAN PAJAK DAERAH

Nama Mahasiswa : Haris Hargo Hutomo

NI : 120810301087

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 16 Desember 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak
NIP. 19670102199232002

Andriana SE, M.SA
NIP. 198209292010122002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.

NIP. 196408091990032001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Haris Hargo Hutomo
NIM : 120810301087
Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 Februari 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Yosefa Sayekti M.Com, Ak (.....)
Sekretaris : Imam Mas'ud M.M., Ak. (.....)
Anggota : Novi Wulandari W. SE, M.Acc&Finn. (.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr.Muhammad Miqdad SE, M.M.,Ak.
NIP 197107271995121001

Haris Hargo Hutomo

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel pajak daerah. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Jember periode 2001 – 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk dengan usia di atas 15 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember periode 2001 – 2014. Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik yang meliputi Uji normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah.

Haris Hargo Hutomo

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Uniiversitas Jember

ABSTRACT

This thesis entitled Analysis of Factors - Factors Affecting Local Tax Revenue aims to determine the effect of variable number of population, per capita income, inflation, and economic growth to variable local taxes. The sample in this study were taken by using purposive sampling. The population used in this study is a population of Jember Regency period 2001 - 2014. The sample used in this study is the population over the age of 15 years. The data used in this research is secondary data drawn from the Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Regency period 2001 - 2014. This research has passed the test classic assumptions which include normality test, Test Multicollinearity, autocorrelation test, and test heterocedasticity. Regression analysis showed that the variables of population, per capita income, inflation, and economic growth significantly influence local tax revenue.

Keywords: *Population, Per Capita Income, Inflation, Economic Growth, Local Taxes.*

RINGKASAN

Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah
Haris Hargo Hutomo; 120810301087; Jurusan Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan
Bisnis; Universitas Jember.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang diberi hak otonom untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam peningkatan PAD adalah pemungutan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD yang penting harus ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa.

Pada tahun 2013, penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember mencapai Rp. 95.188.144.409,00 dengan target sebesar Rp. 86.081.000.000,00. Sedangkan, pada tahun 2014 mencapai Rp. 116.578.557.516,05 dengan target sebesar Rp. 99.555.000.000,00 (BPS Kabupaten Jember). Dilihat dari dua tahun pengamatan, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember selalu melebihi target dari pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember cukup baik.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Pemilihan pemerintahan Kabupaten Jember sebagai objek penelitian dikarenakan saran dari peneliti sebelumnya yang menganjurkan untuk melakukan penelitian dengan objek yang berbeda.

Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember periode 2001 – 2014 sebagai populasi penelitian. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa

variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.



SUMMARY

Analysis of That Affecting Local Tax Revenue; Haris Hargo Hutomo; 120810301087; Accounting major; Economics and Business Faculty; University of Jember.

Jember is a regency in East Java by an autonomous right to organize and manage their own source of local income. One of the government's efforts in improving the Jember district PAD is a collection of local taxes. Local tax as one of the important sources of revenue that should be improved potential and prospects, among others denggan optimize the sources of local tax revenue and increase public awareness of the importance of paying taxes to the national development.

In 2013, tax revenue reached Rp Jember regency. 95,188,144,409.00 with a target of Rp. 86,081,000,000.00. Meanwhile, in 2014 reached Rp. 116,578,557,516.05 with a target of Rp. 99,555,000,000.00 (BPS Jember). Judging from the two years of observation, local tax revenue in Jember always exceeded the target of the government, it indicates that the local tax revenue in Jember pretty good.

Further research is needed that test about the factors that affect the local tax revenue, because there are inconsistencies between research results with each other. Jember regency government election as the research object because of suggestions from previous research that advocated to conduct research with different objects.

The samples were taken by using purposive sampling method, with a population of Jember Regency period 2001 - 2014 as the study population. The results of multiple regression analysis showed that the variables of population, per capita income, economic growth and inflation significantly influence local tax revenue.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Yuli Haryono dan ibu Suwarni, terimakasih untuk kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, doa, dan pengorbanannya selama ini.
2. Nenekku Marti, terimakasih untuk kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, nasehat, doa, dan pengorbanannya selama ini.
3. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Andriana SE, M.SA., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan Akuntansi.
6. Orang yang sangat luar biasa, terbaik, yang kusayang Venna Melinda. Terimakasih atas dukungan, semangat dan doanya.
7. Sahabatku Drajat Priyo T. Dan Aditya Alifianto, *Stay Young, Stay Gold, and Stay You, together.*
8. Teman – teman kos Alpusi Jalan Jawa 4A Nomor 8.
9. Teman – temanku S1 Akuntansi angkatan 2012.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PPERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Yang Melandasi	7
2.1.1 Teori Gaya Pikul	7
2.1.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)	7
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	7
2.1.4 Teori Keynes	8
2.1.5 Pajak	8
2.1.5.1 Fungsi Pajak	8
2.1.5.2 Prinsip Perpajakan	9
2.1.5.3 Jenis – jenis Pajak	10
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.6.1 Pengertian	11
2.1.6.2 Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.7 Pajak Daerah	12
2.1.7.1 Pengertian	12
2.1.7.2 Objek Pajak Daerah	12
2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	13
2.1.8 Penduduk	14
2.1.9 Pendapatan Perkapita	14
2.1.10 Inflasi	15
2.1.11 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Konseptual	19
2.4 Hipotesis	20
2.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan	

Pajak Daerah	20
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan	
Pajak Daerah	20
2.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak	
Daerah	21
2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan	
Pajak Daerah	21

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	24
3.4.1 Variabel Penelitian	24
3.4.2 Definisi Operasional Variabel	24
3.4.2.1 Penduduk	24
3.4.2.2 Pendapatan Perkapita	25
3.4.2.3 Inflasi	26
3.4.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	27
3.4.2.5 Pajak Daerah	27
3.5 Metode Analisis	28
3.5.1 Metode Analisis Deskriptif	28
3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik	28
3.5.2.1 Uji Normalitas	28
3.5.2.2 Uji Multikolenieritas	29

3.5.2.3 Uji Autokorelasi	30
3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas	30
3.5.2.5 Regresi	31
3.5.3 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit Test</i>)	32
3.5.3.1 Uji Simultan (Uji F)	32
3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)	33
3.5.3.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)	33

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Populasi Penelitian	34
4.1.2 Gambaran Sampel Penelitian	34
4.2 Hasil Analisis Data	45
4.2.1 Statistik Deskriptif	45
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	46
4.2.2.1 Uji Normalitas	46
4.2.2.2 Multikolinearitas	46
4.2.2.3 Autokorelasi	47
4.2.2.4 Heterokedastisitas	48
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	49
4.2.4 Uji Hipotesis	51
4.2.4.1 Uji t	51
4.2.4.2 Uji f	52
4.2.4.3 Koefisien Determinasi	53
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	53

4.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	54
4.3.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	54
4.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	55
4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	55
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan	57
5.3 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas 49



DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember	4
2.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu	18
4.1 Jumlah Penduduk	34
4.2 Pendapatan Perkapita	36
4.3 Inflasi	38
4.4 Pertumbuhan Ekonomi	40
4.5 PDRB	42
4.6 Indeks Harga Konsumen	41
4.7 Laju Pertumbuhan Penduduk	43
4.8 Statistik Deskriptif	44
4.9 One – Sample Kolgomorov Test	45
4.10 Uji Multikolinearitas	46
4.11 Uji Autokorelasi	47
4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	48
4.13 Uji F	50
4.14 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan, namun hal ini akan berbeda ketika dilihat dalam sistem pemerintahan daerah di negara Indonesia yang telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Busrizalti, 2013). Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Adanya otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, dan efisien. Kemandirian daerah merupakan suatu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana hal tersebut didukung dengan kemampuan keuangan suatu daerah. Dukungan keuangan merupakan satu faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengurus rumah tangganya. Dalam pemerintah daerah, dukungan keuangan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang sah dan dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Suhendi dalam (Haniz dan Hadi, 2013), semakin tinggi PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d) lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan sumber daya alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan, Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b) penerimaan pinjaman daerah;
- c) dana cadangan daerah; dan
- d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Anggaran pemerintah daerah akan lebih baik jika digunakan untuk mengembangkan ekonomi daerah yang akan berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip kenyamanan pembayaran (*convenience and equity*), yaitu pajak dipungut pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenience*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan (Soemitro, 1992).

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang diberi hak otonom untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam peningkatan PAD adalah pemungutan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD yang penting harus ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa.

Tabel 1.1 Realisasi pajak daerah Kabupaten Jember

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah
2001	7.161.839.626	6.670.000.000
2002	9.796.813.163	6.325.500.000
2003	11.288.805.291,10	8.953.050.000,00
2004	10.874.598.824,36	10.485.000.000,00
2005	16.311.036.159,00	14.105.000.000,00
2006	19.178.932.829,50	15.884.500.000,00
2007	20.533.246.972,00	17.790.000.000,00
2008	21.658.000.543,00	19.523.998.886,00
2009	26.471.756.842,00	25.338.420.000,00
2010	30.841.171.434,00	28.820.360.000,00
2011	35.778.423.508,00	34.873.998.990,00
2012	55.628.583.942,00	50.694.817.000,00
2013	95.188.144.409,05	86.081.000.000,00
2014	116.578.557.516,05	99.555.000.000,00

Sumber: BPS Kabupaten Jember.

Pada tahun 2013, penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember mencapai Rp. 95.188.144.409,00 dengan target sebesar Rp. 86.081.000.000,00. Sedangkan, pada tahun 2014 mencapai Rp. 116.578.557.516,05 dengan target sebesar Rp. 99.555.000.000,00 (BPS Kabupaten Jember). Dilihat dari dua tahun pengamatan, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember selalu melebihi target dari pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember cukup baik.

Berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, Tamara (2009) menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal serupa

juga dijelaskan oleh Haniz dan Hadi (2013) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta.

Triastuti dan Pratomo (2015), mengatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2009), Haniz dan Hadi (2013), dan Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Haniz dan Hadi (2013), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal serupa juga dijelaskan oleh Triastuti dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung pada tahun 2007 – 2014.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

- 1) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?
- 2) Apakah pendapatan perkapita daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?
- 3) Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?
- 4) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita daerah terhadap penerimaan pajak daerah.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
- 2) Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pada khususnya dan perpajakan pada umumnya.
- 3) Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya. Terutama berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor yang diduga kuat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Melandasi

2.1.1 Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya (Resmi, 2014). Untuk kepentingan itu, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

2.1.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut Resmi (2014), teori ini mendasar pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan maka tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang harus menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban yang mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Lincoln Arsyad dalam Rustiono (2008), menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut Todaro (2004), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar

berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

2.1.4 Teori Keynes

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang (Nugroho, 2012).

2.1.5 Pajak

Menurut Soemitro dalam (Negara, 2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam (Siahaan, 2010), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.

2.1.5.1 Fungsi Pajak

Menurut Negara (2008), pajak memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini, pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun terkadang dalam sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

3. Fungsi Sosial

Maksudnya, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.

2.1.5.2 Prinsip Perpajakan

Menurut Smith dalam Soemitro (1992), pengenaan wajib pajak memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesamaan dan Keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan, mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini juga sering disebut tidak ada perbedaan, sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Prinsip keadilan yaitu, beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan ini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari. Mengenai prinsip keadilan ini, ada dua prinsip yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit*) dan prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dalam prinsip manfaat ini, Mangkoesobroto dan Soeparmoko dalam Haniz dan Hadi (2013) mempunyai pendapat yang sama, yaitu manfaat yang diterima wajib pajak sesuai dengan pembayaran kepada pemerintah. Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) mengandung arti wajib pajak akan dikenai pajak yang

sama bebannya, sedangkan wajib pajak yang kemampuan membayar pajaknya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula.

2. Kepastian (*certainly*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti bahwa pajak hendaknya jelas, tegas, dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Kenyamanan Pembayaran (*convenience of payments*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenience*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan.

4. Pemungutan Ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak, dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

2.1.5.3 Jenis-jenis Pajak

Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas, yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan kepada sesuatunya tetapi kepada seseorang atau badannya.

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. *Tax incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya kepada konsumen akhir. Merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu

kegiatan tertentu yang menyertainya. Contohnya, pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

2.1.6.1 Pengertian

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Halim (2004), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang asli digali oleh daerah dan digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

2.1.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada bab lima nomor satu disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a) pajak daerah;
- b) retribusi daerah;
- c) hasil pengelolaan alam milik daerah;
- d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.7 Pajak Daerah

2.1.7.1 Pengertian

Menurut Siahaan (2010), pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Objek Pajak Daerah

Menurut Resmi (2013), pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Pajak daerah propinsi, meliputi:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak daerah kabupaten atau kota, meliputi:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu sistem *official assesment* dan sistem *self assesment* (Mardiasmo, 2003):

1. *Official Assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tanggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. *Self Assesment*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan pembayaran, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.8 Penduduk

BPS Kabupaten Jember (2012) menjabarkan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said dalam Mahsunah (2013), yang dimaksud penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas dan migrasi.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu yang termasuk warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1. Sukirno dalam Rosyetti (2009), menyatakan bahwa penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

2.1.9 Pendapatan Perkapita

Adji dan Suratno (2007) menjelaskan bahwa pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara. Pendapatan perkapita memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, sebagai pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar negara.

Pendapatan perkapita dapat diperoleh dengan menurunkan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pendapatan perkapita disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun. Pada

penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi atas tahun dasar (Rosyetti, 2009).

2.1.10 Inflasi

Feriyanto (2014), menjelaskan bahwa inflasi merupakan proses kenaikan harga secara terus menerus. Menurut Sukirno (2010), inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Masalah kenaikan harga yang terjadi di berbagai negara diakibatkan oleh beberapa faktor. Di negara berkembang, pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari masalah berikut (Sukirno, 2010):

- a) Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b) Para pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.

Kedua masalah tersebut berlaku apabila perekonomian sudah mendekati penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan kata lain, dalam perekonomian yang sudah maju, masalah inflasi sangat erat hubungannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Disamping itu, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat kenaikan harga barang yang diimpor. Penambahan penawaran yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan kekacauan politik serta ekonomi sebagai akibat dari pemerintahan yang kurang bertanggungjawab.

2.1.11 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Untoro (2010) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa

terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Triastuti dan Pratomo, 2015). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat dan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan menambah penerimaan daerah di sektor pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Di beberapa daerah di Indonesia, beberapa peneliti telah mencoba meneliti beberapa variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dimaksudkan diantaranya dilakukan oleh Tamara (2009) yang meneliti tentang pengaruh jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung pada tahun 1999 – 2008. Hasilnya, Jumlah penduduk, Jumlah Industri, PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung. Namun, tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi perolehan pajak di Kota Bandung.

Agustiningtyas (2003), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 1998-2001. Agustiningtyas (2003) meregresi enam variabel dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan jumlah hotel tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Triastuti dan Pratomo (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kota Bandung pada tahun 2007 – 2014. Triastuti dan Pratomo meregresi tiga variabel dengan analisis regresi linier data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Bandung pada tahun 2007 – 2014.

Haniz dan Hadi (2013), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Tegal dengan variabel pajak

daerah, jumlah penduduk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Haniz dan Hadi menggunakan analisis regresi linier berganda, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal.

Nurrohman (2010), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007. Nurrohman meregresi empat variabel yaitu PDRB, inflasi, jumlah penduduk, dan pajak daerah menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994 – 2007. Sedangkan, variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta.

Adapun penilian ini adalah penelitian yang menggunakan kombinasi variabel dan studi empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tiga variabel yaitu jumlah penduduk, pendapatan perkapita, dan inflasi merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas (2003), Tamara (2009), dan Haniz (2013) karena masih terjadi ketidakkonsistenan hasil dan ketertarikan peneliti pada ketiga variabel tersebut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Triastuti dan Pratomo (2015).

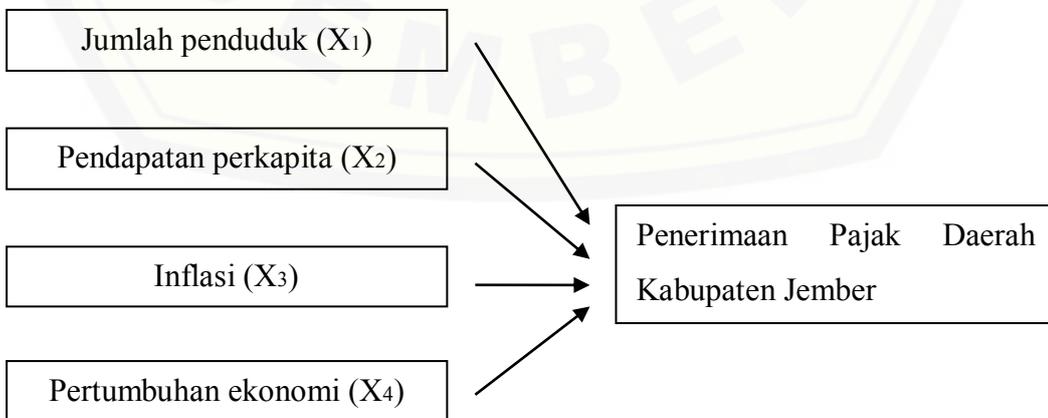
Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Arshad Darulmasyah Tamara (2009) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1999 – 2008).”	Pajak daerah, PDRB, jumlah penduduk, dan Jumlah Industri.	Analisis regresi berganda.	PDRRB, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung, sedangkan inflasi tidak berpengaruh.
Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2015) “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung Periode 2007 – 2014).”	Pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, inflasi.	Analisis regresi linier data Panel.	Pertumbuhan ekonomi, belanja modal, inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung tahun 2007 – 2014.
Haniz dan Hadi (2013) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tegal.”	Pajak daerah, jumlah penduduk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.	Analisis regresi berganda.	Jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal, sedangkan inflasi tidak berpengaruh.
Veronika Winarti Agustiningtyas (2003), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Investasi	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, investasi dan pemerintah dan

Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2001”.	Pemerintah Daerah, Daya Listrik Tersambung.		daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
Alfian Nurrohman (2010) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta tahun 1994 – 2007.	Pajak daerah, PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk.	Analisis regresi berganda.	PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta pada tahun 1994 – 2007, sedangkan inflasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember.



Keterangan:

—————→ : berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Sesuai dengan teori kewajiban pajak mutlak (Resmi, 2014) yaitu karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan maka tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang harus menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban yang mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya akan menambah pendapatan daerah pada sektor pajak, karena menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2009) serta Haniz dan Hadi (2013) yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

H1 = jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.4.2. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Menurut teori gaya pikul yang menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya (Resmi, 2014). Untuk kepentingan itu, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak.

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan

memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Maka pendapatan perkapita akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas (2003), yang menyatakan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

H2 = pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang. Berhubungan dengan teori keynes, ketika terjadi banyak permintaan terhadap barang atau jasa maka akan menambah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah melalui pajak pertambahan nilai atas barang-barang yang dijual. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triastuti dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung pada periode 2007 – 2014.

H3 = inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Nurrohman (2010) menyatakan bahwa, bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan naiknya pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi regional oleh Lincoln Arsyad dalam Rustiono (2008) yang menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Maka ketika pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Triastuti dan Pratomo (2015) serta Haniz dan Hadi (2013), menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

H4 = pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai *explanatory research* atau *confirmatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan tentang kausalitas dan menguji keterkaitan antara beberapa variabel melalui beberapa hipotesis atau penelitian penjelasan (Singrimbun dan Effendi, 1995).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi (Rutoto, 2007). Sedangkan menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014.

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang mampu secara representatif dapat mewakili populasinya (Rutoto, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pemilihan sampel bersasaran (*purposive sampling*), dengan kriteria yaitu data tahun 2001 sampai dengan 2014 karena ketersediaan data yang ada di *website* Badan Pusat Statistik (jemberkab.bps.go.id) hanya ada untuk periode 2001 sampai 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu data tentang jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi periode 1990 sampai dengan 2014. Sumber data menggunakan data

sekunder (*time series*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Independen:
 - a. Jumlah penduduk.
 - b. Pendapatan perkapita.
 - c. Inflasi.
 - d. Pertumbuhan ekonomi.
- 2) Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

3.4.2.1 Jumlah Penduduk

Menurut Said dalam Mahsunah (2013), yang dimaksud penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses- proses demografi yaitu fertilitas dan migrasi. Cara untuk menghitung jumlah penduduk yaitu dengan cara sensus, yaitu mendata langsung setiap jiwa penduduk secara lengkap, begitu pula dengan jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun, jumlah penduduk pria, dan jumlah penduduk wanita (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2012).

Sensus penduduk diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Selain itu, perhitungan jumlah penduduk juga dilakukan dengan cara menghitung proyeksi jumlah penduduk. Proyeksi jumlah penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Dapat dikatakan proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Badan Pusat Statistik menggunakan metode geometrik untuk menghitung jumlah penduduk tiap tahun. Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk (Adioetomo dan Samosir, 2010). Laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut formula yang digunakan pada metode geometrik:

dimana:

- Pt = jumlah penduduk pada tahun t
- Po = jumlah penduduk pada tahun dasar
- r = laju pertumbuhan penduduk
- t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).

Penelitian ini menggunakan tahun dasar 2000 dan 2010 (tahun diadakan sensus penduduk), karena penelitian ini menggunakan periode antara tahun 2001 sampai dengan 2014. Penggunaan tahun dasar 2000 untuk jumlah penduduk periode 2001 sampai dengan 2009, dan tahun dasar 2010 untuk jumlah penduduk periode 2010 sampai 2014.

3.4.2.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dapat diperoleh dengan menurunkan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pendapatan perkapita disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi atas tahun dasar (Rosyetti, 2009). Konsep pendapatan nasional yang bisa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara umumnya adalah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Rosyetti, 2009):

Dimana :

IPC_n = Income Per Capita (Pendapatan Per kapita) tahun n .

$PDRB_n$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun n .

P_n = Population (Jumlah Penduduk) tahun n .

n = tahun saat ini (ketika menghitung pendapatan perkapita pada tahun 2001, maka n yang dimaksud adalah tahun 2001).

3.4.2.3 Inflasi

Feriyanto (2014) menjelaskan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus. Inflasi juga merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai riil mata uang yang dinyatakan dalam persentase.

Penelitian ini menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam menghitung inflasi di tiap tahunnya. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Perinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHK adalah sebagai berikut (Rosyidi, 2010):

Dimana:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen Periode ini.

IHK_o : Indeks Harga Konsumen Periode Lalu (periode sebelumnya)

3.4.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Sedangkan menurut Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Sukirno, 2010):

keterangan:

G	= laju pertumbuhan ekonomi pada tahun t.
PDRB _t	= pendapatan daerah (PDRB) riil pada tahun t.
PDRB ₀	= pendapatan daerah (PDRB) pada tahun sebelumnya.
Tahun t	= tahun dimana kita ingin menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

3.4.2.5 Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dari pos PAD dalam laporan realisasi APBD.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan penyajian dari ringkasan data. (Ghozali (2011), menjelaskan bahwa statistik deskriptif menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data dengan menyajikan rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, dan *range*. Data deskriptif yang diteliti meliputi semua variabel penelitian.

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji asumsi, apakah regresi yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel dependen, variabel independen, dan keduanya memiliki distribusi yang normal. Menurut Ardhiastari (2006), model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2011):

1. Analisis Grafik

Untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih baik adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram, maka menunjukkan pola distribusi yang normal.

2. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik bisa menyesatkan jika tidak berhati-hati. Kadang, secara berkala terlihat normal, padahal secara statistik terlihat berbeda. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kogmolorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis:

H0: data residual berdistribusi normal

H1: data residual tidak berdistribusi normal

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.90), maka terindikasi terjadi multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat terjadi karena kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- 3) Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua variabel ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi. Batasan umum yang

digunakan untuk mengukur multikolinieritas adalah $tolerance < 0.01$ dan nilai $VIF > 10$.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Ghozali (2011), menjelaskan bahwa autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *runs test*. *Runs test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau *random*. Apabila signifikansi pada *runs test* lebih dari lima persen berarti data residual bersifat random. Sebaliknya apabila signifikansi pada *runs test* kurang dari lima persen berarti data residual tidak acak. Hipotesis yang akan diuji:

H_0 : residual random

H_1 : residual tidak random

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka disebut sebagai heterokedastisitas. Ghozali (2011), mengatakan bahwa regresi yang baik adalah bersifat homokedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, salah satunya adalah melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*

antara SRESID dan ZPRED ketika sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2011).

3.5.2.5 Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak daerah), maka digunakan model regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Dirumuskan melalui persamaan berikut:

$$PD = a + \beta_1(JP) + \beta_2(PPK) + \beta_3(INF) + \beta_4(PE) + e$$

Dimana:

PD : Penerimaan Pajak Daerah

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

JP : Jumlah Penduduk

PPK : Pendapatan Perkapita

INF : Inflasi

PE : Pertumbuhan Ekonomi

E : Error term.

Adanya perbedaan satuan hitung, maka model di atas ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural yaitu:

$$\text{LnPPD} = \beta_0 + \beta_1(\text{LnJP}) + \beta_2(PPK) + \beta_3(INF) + \beta_4(PE) + e$$

Dimana:

Ln : Logaritma Natural.

3.5.3 Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit test*)

3.5.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- 1) Merumuskan hipotesis dan alternatifnya. (H1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- 2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α). Tingkat signifikansinya dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$.
- 3) Melakukan uji F dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Ketika nilai F tabel = $F_{\alpha k (n-k-1)}$
 - a. (H1) ditolak jika F hitung < F tabel.
 - b. (H1) diterima jika F hitung > F tabel.

3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2011), mengatakan bahwa koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1.
- 2) Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- 3) Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara parsial (Dajan, 1994). Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan uji t adalah:

- 1) Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya. (H1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Pilih taraf nyata signifikansi (α). Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 persen atau $\alpha = 5\%$. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika hasil dari nilai signifikasinya berada dibawah 5%.
- 3) Melakukan uji t dengan perbandingan antara t hitung dan t tabel.
 - a. (H1) ditolak apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. (H1) diterima apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2001 – 2014. Dari uraian pada bagian pembahasan dapat disimpulkan:

1. Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, sehingga H1 diterima.
2. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, sehingga H2 diterima.
3. Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, sehingga H3 diterima.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, sehingga H4 diterima.

5.2 Keterbatasan

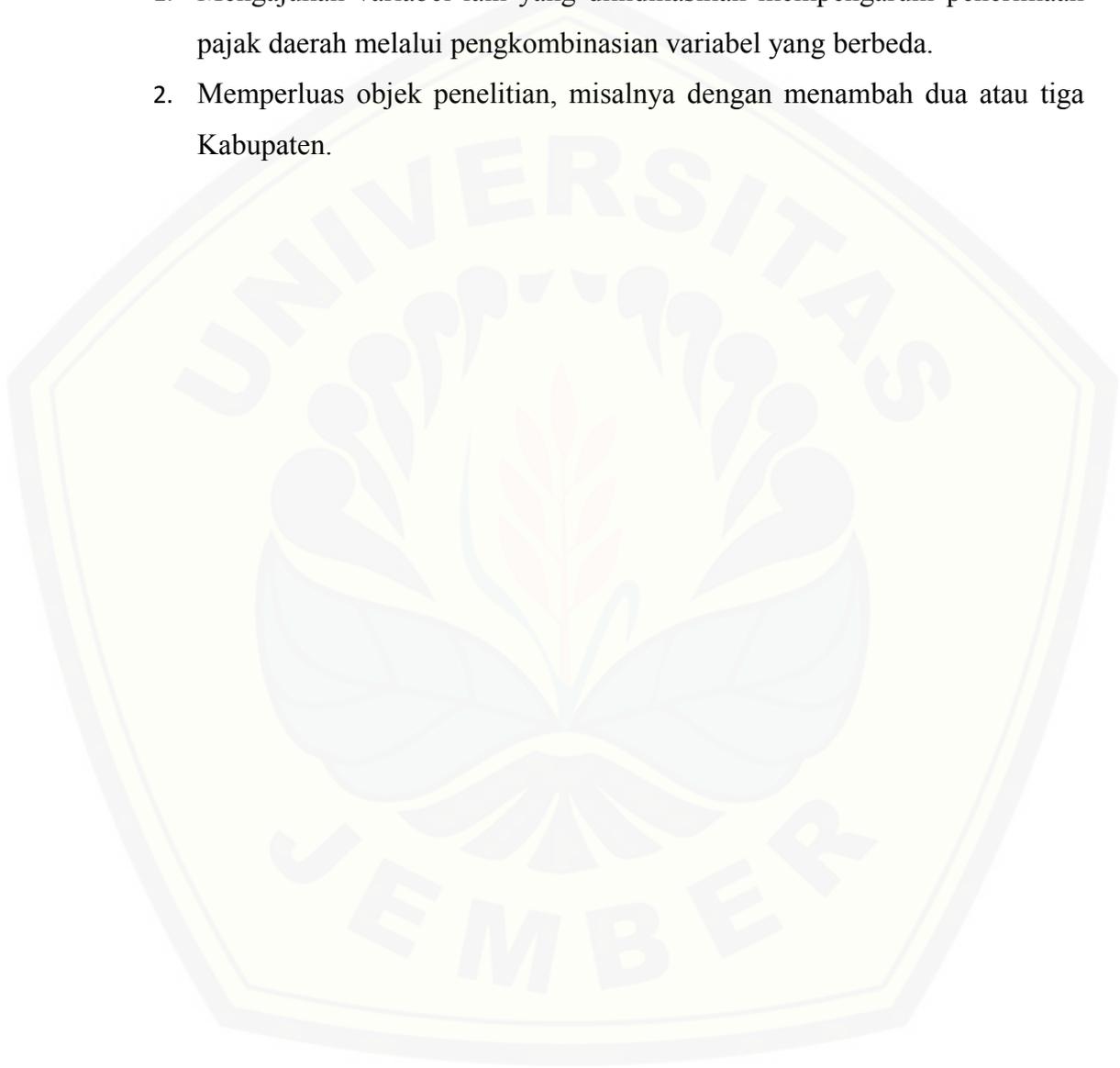
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak empat variabel independen yaitu jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak daerah juga didapatkan dari beberapa variabel seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Dengan kata lain variabel yang digunakan dalam penelitian ini kurang spesifik.
2. Objek penelitian kurang luas karena hanya menggunakan sampel Kabupaten atau sehingga penelitian ini tidak bisa di generalisasikan, artinya hanya bisa digunakan di Kabupaten Jember.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Mengajukan variabel lain yang diindikasikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah melalui pengkombinasian variabel yang berbeda.
2. Memperluas objek penelitian, misalnya dengan menambah dua atau tiga Kabupaten.



DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo dan Samosir. 2010. *Dasar – Dasar Demografi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adji, Wahyu, dan Suratno. 2007. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Agustiningtyas, V.W. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2001*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Ardhiastari, Heidi. 2006. *Analisis Fundamental Terhadap Return Saham*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2012. *Jember Dalam Angka*. Kabupaten Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Pedoman Penghitungan Proyeksi Jumlah Penduduk Dan Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Buzrizalti, M. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Dajan, Anto. 1994. *Pengantar Metode Statistik (Jilid 2)*. Jakarta: LP3ES.
- Devano, S., dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: LP3ES.
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haniz, N.F., dan Hadi Sasana. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1999 – 2008)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Volume 1 Nomor 2. Politeknik Negeri Bandung.
- Mahsunah, Durrotul. 2013. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 1 Nomor 3. Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Negara, T.A.S. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, P.W. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurrohman, Alfian. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 1994 – 2007*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII.
- Rahardja, P., dan Manurung, M. 2001. *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: LP3ES.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyetti. 2009. *Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk Dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuatan Singingi*. Jurnal Ekonomi Volume 17 Nomor 2, Universitas Riau.
- Rosyidi, Suherman. 2012. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Siahaan, M.P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singrimbun, M., dan Effendi S. 1995. *Metode Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Tamara, Arsyad Darulmalshah. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak di Kota Bandung (1999 – 2008)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Volume 1 Nomor 2, November 2009.

Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Triastuti, D., dan Pratomo Dudi. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan atau Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung Periode 2007 – 2014)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Telkom.

Untoro, Joko. 2010. *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Dasar 1945.

Lampiran 1

JUMLAH PENDUDUK

Jumlah Penduduk	
Tahun	Jumlah
2001	2201261
2002	2214990
2003	2231793
2004	2249213
2005	2264286
2006	2282820
2007	2313100
2008	2320844
2009	2327957
2010	2334579
2011	2345851
2012	2362179
2013	2381400
2014	2413678

Lampiran 2

PENDAPATAN PERKAPITA

Pendapatan Perkapita	
Tahun	Jumlah
2001	3,134264142
2002	3,23757905
2003	3,341691537
2004	3,469627345
2005	3,619505707
2006	3,813702513
2007	3,988918719
2008	4,215633679
2009	4,43596493
2010	4,947594166
2011	5,268673151
2012	5,609642533
2013	5,948560309
2014	6,032016379

Lampiran 3**INFLASI**

Inflasi (%)	
Tahun	Jumlah
2001	9,76
2002	5,57
2003	2,99
2004	5,26
2005	6,12
2006	6,7
2007	3,36
2008	10,63
2009	3,65
2010	7,08
2011	2,43
2012	4,49
2013	7,21
2014	2,27

Lampiran 4

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi (%)	
Tahun	Jumlah
2001	
2002	3,94
2003	3,99
2004	4,63
2005	5,01
2006	6,22
2007	5,98
2008	6,03
2009	5,54
2010	11,8
2011	7
2012	7,2
2013	6,9
2014	2,7

Lampiran 5

PDRB KABUPATEN JEMBER

Penerimaan PDRB	
Tahun	Jumlah
2001	6899333,42
2002	7171205,22
2003	7457963,78
2004	7803930,93
2005	8195596,1
2006	8705996,37
2007	9226767,89
2008	9783828,13
2009	10326735,61
2010	11550549,44
2011	12359522,18
2012	13250979,79
2013	14165901,52
2014	14559345,23

Lampiran 6

INDEKS HARGA KONSUMEN

IHK	
Tahun	Jumlah
2001	109,76
2002	115,88
2003	119,35
2004	125,63
2005	133,33
2006	142,27
2007	103,36
2008	114,35
2009	118,53
2010	126,93
2011	130,02
2012	135,86
2013	145,66
2014	148,98

Lampiran 7

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk	
Tahun	Jumlah
2001	0,006218525
2002	0,006227702
2003	0,006680278
2004	0,006961436
2005	0,006909435
2006	0,007121977
2007	0,007997166
2008	0,007414830
2009	0,006930567
2010	-
2011	0,000328483
2012	0,005893762
2013	0,006640946
2014	0,008364829

Lampiran 8

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

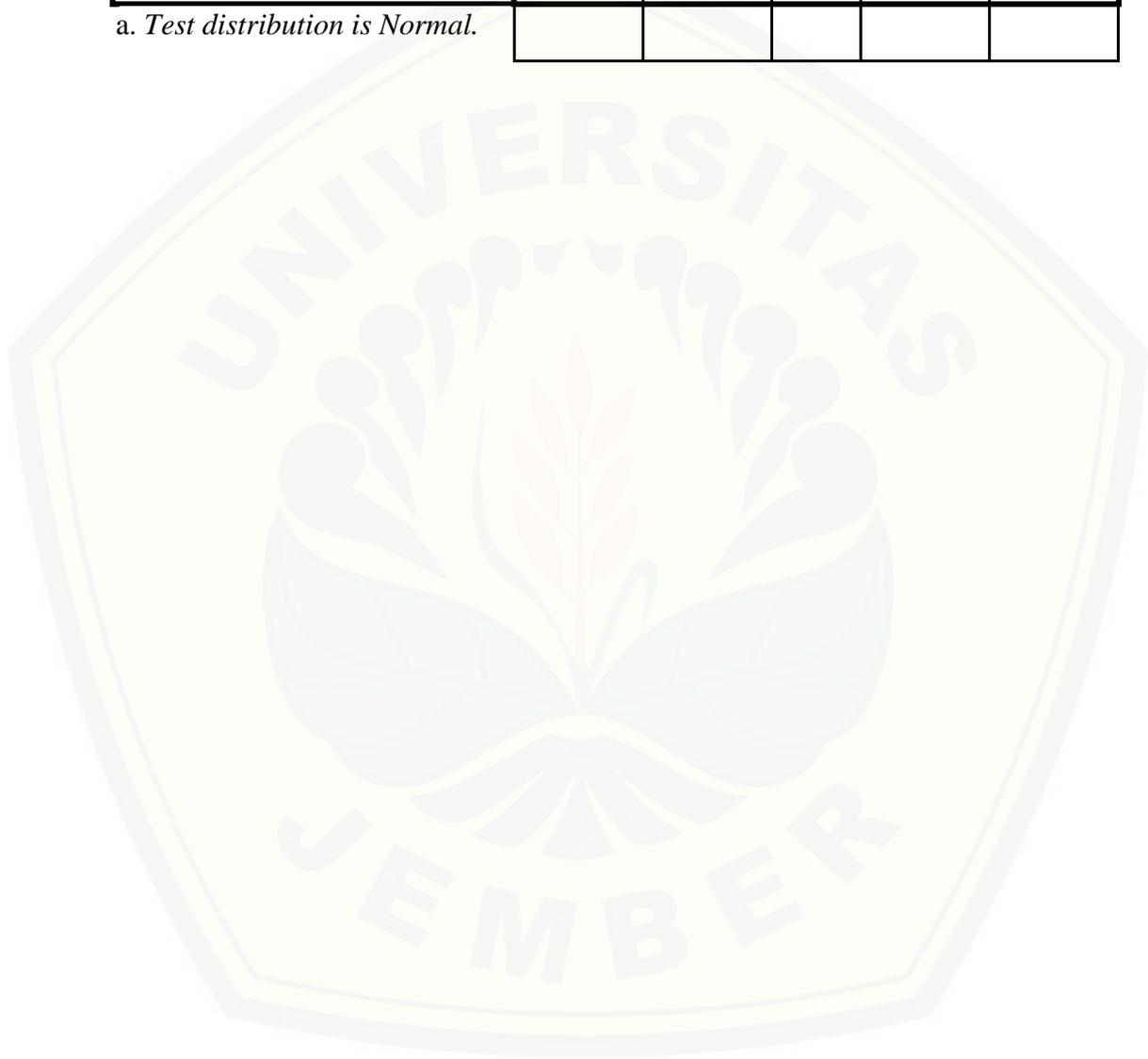
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Sum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Variance</i>
JP	24	14,604	14,696	205,091	14,649	0,027	0,0072
PPK	24	1,142	1,797	20,270	1,447	0,230	0,049
INF	24	0,027	0,1063	0,7752	0,055	0,025	0,062
PE	24	0,07	0,118	0,867	0,061	0,023	0,051
PD	24	22,692	24,741	283,88	23,687	0,596	0,326
<i>Valid N (listwise)</i>	24						

Lampiran 9

UJI NORMALITAS DATA

One-Sampel Kolmogorov Test

<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	.495	.743	.861	1.286	.974
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.967	.639	.448	.073	.299
a. <i>Test distribution is Normal.</i>					



Lampiran 10

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.799E10	1.992E11		.241	.815		
JP	-12269.621	170404.544	-.015	-.072	.944	.623	1.606
PPK	60437.598	16500.012	1.177	3.663	.005	.272	3.674
INF	1.797E7	1.620E9	.002	.011	.991	.924	1.082
PE	-1.622E10	8.764E9	-.529	-1.851	.097	.344	2.909

Lampiran 11

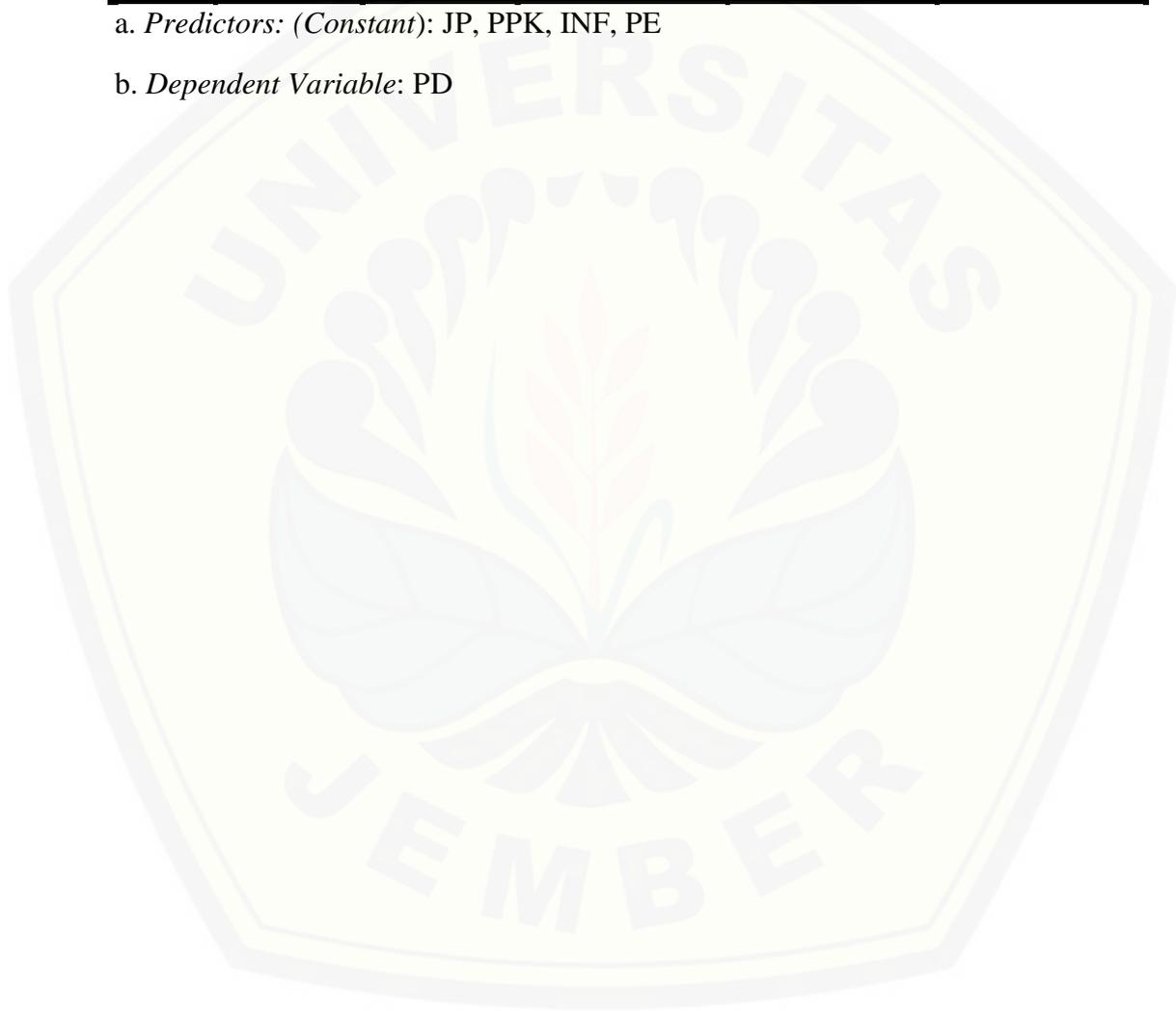
UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.864 ^a	.747	.634	2.004E10	1.993

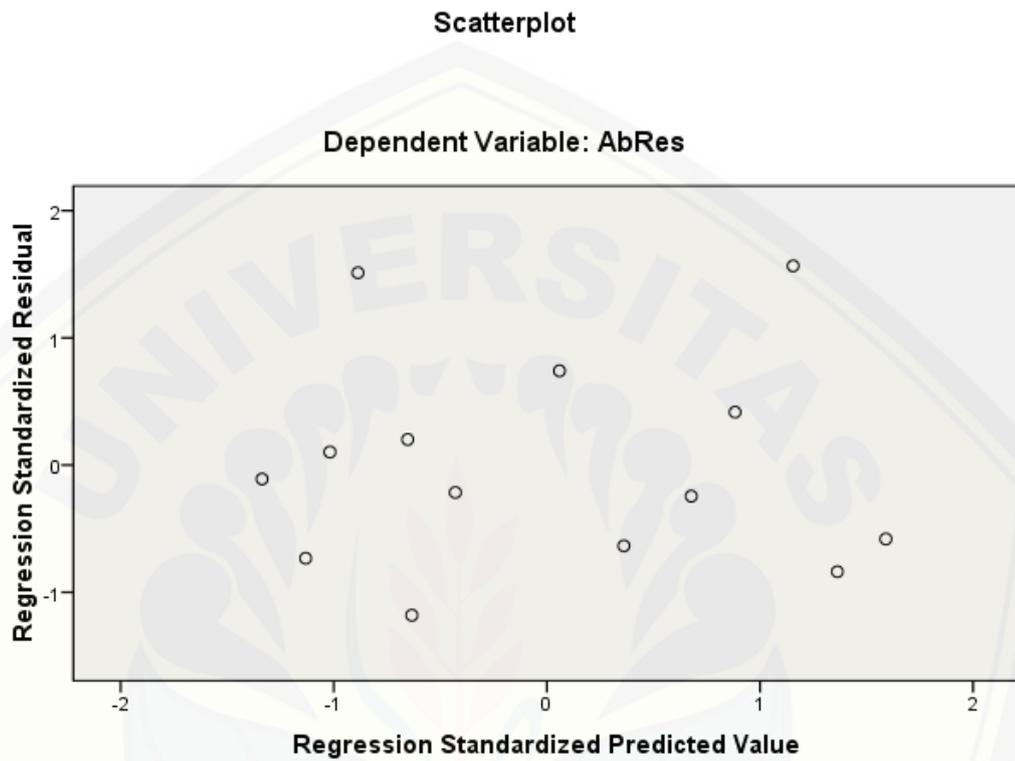
a. Predictors: (Constant): JP, PPK, INF, PE

b. Dependent Variable: PD



Lampiran 12

UJI HETEROKEDASTISITAS



Lampiran 13

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	4.799E10	1.992E11		.241	.815
JP	.621	.544	.015	2.072	.041
PPK	.598	.012	.177	2.663	.023
INF	.79E7	.62E9	.002	3.011	.018
PE	.6E10	.76E9	.529	1.851	.047

a. Dependent Variable: PD

Lampiran 14

UJI F
ANOVA^b

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	1.067E22	4	2.668E21	6.640	.009 ^a
<i>Residual</i>	3.615E21	9	4.017E20		
<i>Total</i>	1.429E22	13			

a. Predictors: (Constant): JP, PPK, INF, PE

b. Dependent Variable: PD

Lampiran 15

KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.864 ^a	.747	.634	0.004E10



Lampiran 16

PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER

Pajak Daerah (Rupiah)	
Tahun	Jumlah
2001	7161839626
2002	9796813163
2003	11288805291
2004	10874598824
2005	16311036159
2006	19178932829
2007	20533246972
2008	21658000543
2009	26471756842
2010	30841171434
2011	35778423508
2012	55628583942
2013	95188144409
2014	116578557516

Lampiran 17

LOGARITMA NATURAL JUMLAH PENDUDUK

LN (Jumlah Penduduk)	
Tahun	Jumlah
2001	14,60454094
2002	14,61075845
2003	14,61831586
2004	14,62609094
2005	14,63277004
2006	14,64092208
2007	14,65409917
2008	14,65744147
2009	14,66050162
2010	14,66334213
2011	14,66815879
2012	14,67509506
2013	14,68319911
2014	14,69666228

Lampiran 18

LOGARITMA NATURAL PENDAPATAN PERKAPITA

LN (Pendapatan Perkapita)	
Tahun	Jumlah
2001	1,142394423
2002	1,174825844
2003	1,206477127
2004	1,244047195
2005	1,286337472
2006	1,338600505
2007	1,383520197
2008	1,438799919
2009	1,489745164
2010	1,598901431
2011	1,661778557
2012	1,724486998
2013	1,783149225
2014	1,797081346

Lampiran 19

LOGARITMA NATURAL PAJAK DAERAH

LN(Pajak Daerah)	
Tahun	Jumlah
2001	22,69203272
2002	23,00532298
2003	23,14707739
2004	23,10969552
2005	23,51510778
2006	23,67707827
2007	23,74531121
2008	23,79864076
2009	23,99934422
2010	24,15211637
2011	24,30061085
2012	24,74196301
2013	25,27912124
2014	25,4818312